DEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PILKADA 2020

Pencalonan dan Pemutakhiran Data Pemilih



DEFINISI DAN TUJUAN

Segala hal yang mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang Demokratis.

Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan.

Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini.

Pemetaan Kerawanan saat terjadinya pandemi Covid-19 (Bencana non alam).



DIMENSI IKP PILKADA 2020

(UPDATE PASCA COVID-19)



KONTEKS SOSIAL POLITIK

- Gangguan Keamanan (Bencana Alam Dan Bencana Sosial)
- Kekerasan Atau Intimidasi
 Pada Penyelenggara
- KeberpihakanPenyelenggara Pemilu
- Rekruitmen Penyelenggara
 Pemilu Yang Bermasalah
- Ketidaknetralan ASNPenyalah GunaanAnggaran

KONTEKS PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

- Dukungan Teknologi
 Informasi
- Infrastruktur Sistem
 Informasi Penyelenggara
 Pemilu

KONTESTASI

September 2020

PARTISIPASI

November 2020

DPDATE PEMETAAN KERAWANAN PILKADA SERENTAK 2020 KABUPATEN / KOTA





Gangguan Keamanan (Bencana Alam Dan Bencana Sosial)

Kekerasan Atau Intimidasi Pada Penyelenggara

KABUPATEN/KOTA DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Manokwari

Selatan

Kabupaten Sleman

Kabupaten Kaimana

Kabupaten Nabire

Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Bandung

Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Lamongan

Kabupaten Halmahera Utara





KONTEKS POLITIK

Keberpihakan Penyelenggara Pemilu

Rekruitmen Penyelenggara Pemilu Yang Bermasalah

Ketidaknetralan ASN

Penyalahgunaan Anggaran

KABUPATEN/KOTA DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Sijunjung Kota Makassar Kabupaten Lamongan Kota Sungai Penuh Kabupaten Mamuju
Kabupaten Klaten
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Agam





KONTEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

Dukungan Teknologi Informasi

Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu

KABUPATEN/KOTA DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kabupaten Manokwari Selatan

Kabupaten Supiori

Kota Solok

Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Kepulauan

Meranti

Kabupaten Malinau

Kabupaten Morowali Utara

Kabupaten Mamberamo Raya

Kabupaten Agam

Kabupaten Siak

Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Kepulauan Aru

Kabupaten Kaimana





Anggaran Pilkada terkait covid-19

Data terkait covid-19

Dukungan pemerintah daerah

Resistensi Masyarakat

Hambatan Pengawasan Pemilu

KABUPATEN/KOTA DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kota Makassar

Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Bulungan

Kabupaten Karawang

Kota Manado

Kabupaten Minahasa Utara

Kota Tomohon

Kabupaten Gowa

KabupatenSijunjung

Kota Sungai Penuh

Kabupaten Tasikmalaya

KabupatenLamongan

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kota Banjarbaru

Kota Ternate

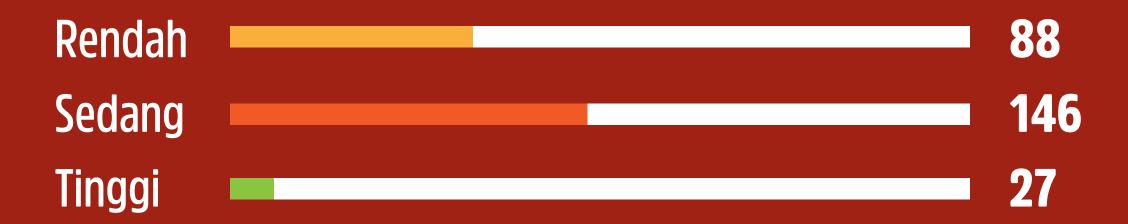
Kota Depok

Kota Tangerang Selatan

Kota Semarang

Kabupaten Bantul

Kabupaten Melawi







Gangguan Keamanan (Bencana Alam Dan Bencana Sosial)

Kekerasan Atau Intimidasi Pada Penyelenggara

PROVINSI DENGAN KERAWANAN TINGGI

Sumatera Barat
Jambi
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah

Kepulauan Riau
Bengkulu
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah





KONTEKS POLITIK

Keberpihakan Penyelenggara Pemilu

Rekruitmen Penyelenggara Pemilu Yang Bermasalah

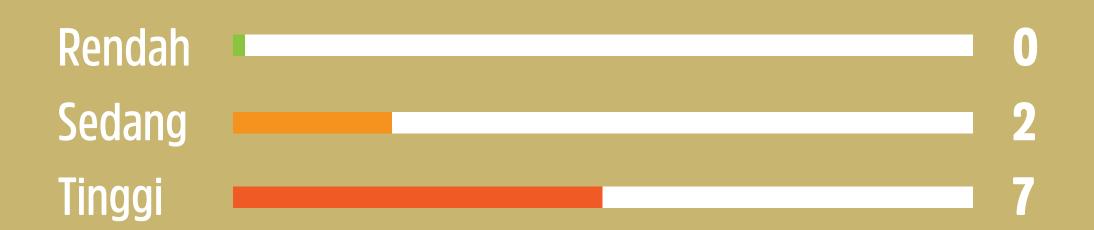
Ketidaknetralan ASN

Penyalahgunaan Anggaran

PROVINSI DENGAN KERAWANAN TINGGI

Jambi
Sulawesi Utara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Utara

Bengkulu
Sulawesi Tengah
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah





KONTEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

Dukungan Teknologi Informasi

Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu

PROVINSI DENGAN KERAWANAN TINGGI

Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Bengkulu
Kalimantan Utara
Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Jambi
Kalimantan Tengah





KONTEKS PANDEMI

Anggaran Pilkada terkait covid-19

Data terkait covid-19

Dukungan pemerintah daerah

Resistensi Masyarakat

Hambatan Pengawasan Pemilu

PROVINSI DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Sumatera Barat Kepulauan Riau Sulawesi Tengah
Kalimantan Utara
Bengkulu
Jambi





REKOMENDASI

Memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan pemutakhiran dan pemilih.

Koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemic covid-19 di masing-masing daerah.

Memastikan dukungan anggaran penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran penanggulangan covid-19

Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu.

